

PERAN MEDIA PENYIARAN DALAM PROSES PEMULIHAN PASCA BENCANA

Oleh: Fitri Murfiani*

Abstract

Broadcasting media is very important for human life alteration. Radio and television are broadcasting medias which are efisien to reach large audiences. Media has a big attention for disaster, such as earthquake that happened in Yogyakarta. Disaster usually creates uncertain situation. It is also as a big news to be broadcasted by the media. Media must have a control function for the government and social institutions. National television is also limited in spreading/ broadcasting informations in a long duration because the television must give an up to date information or we call it a hot news. That is why local media must take more roles in this recovering process.

Keyword: Media, Penyiaran, Pasca Bencana.

Pendahuluan

Masih teringat di pikiran kita, tanggal 27 Mei 2006 yang lalu terjadi gempa yang berkekuatan 5,9 skala *richter* mengguncang Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pada pukul 05.53 wib. Ketika terjadi guncangan kita masih belum tahu apa sebenarnya yang terjadi, banyak yang berpikir hal itu diakibatkan oleh letusan gunung Merapi, baru beberapa waktu kemudian baru diketahui bahwa guncangan itu berasal dari gempa tektonik. Berdasarkan pemantauan oleh Stasiun Geofisika Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Yogyakarta, gempa tersebut terjadi pada pukul 05.53.58 di lepas pantai Samudra Hindia, posisi *episentrum* pada koordinat 8,26 Lintang Selatan dan 110,33 Bujur Timur, atau pada jarak 38 kilometer selatan Yogyakarta pada kedalaman 33 kilometer. Sapa yang paling berjasa dalam penyampaian informasi itu?

Tidak ada seorang pun yang dapat menyangkal peran media, khususnya media penyiaran dalam penyampaian informasi tentang bencana tersebut. Sejak menit-menit pertama setelah gempa terjadi, ketika saluran informasi formal tersumbat, informasi yang diperoleh masyarakat datang dari institusi- institusi

Tidak ada seorang pun yang dapat menyangkal peran media, khususnya media penyiaran dalam penyampaian informasi tentang bencana tersebut.

*Dosen Ilmu Komunikasi Prodi S-1 Televisi STS Surakarta

penyiaran. Stasiun televisi pun, baik yang lokal maupun nasional, dengan memanfaatkan efek dramatik gambar-gambar yang diambil dengan *angle* yang pas berhasil menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan yang sangat lugas sehingga dengan cepat menggugah nurani para penontonnya. Hal ini disadari ataupun tidak media penyiaran telah melampaui fungsinya sebagai media informasi, hiburan, dan pendidikan. Melalui informasi yang disampaikan secara audio visual, solidaritas masyarakat terbangun dengan cepat. Bantuan datang dari segala lapisan masyarakat, sebagai wujud rasa solidaritas antar sesama.

Media penyiaran dalam minggu-minggu pertama pasca bencana dapat dikatakan telah menjalankan fungsi sosialnya dengan baik, sesuai dengan UU Penyiaran 2002. UU ini sangat memfungsikan media penyiaran ke dalam fungsi sosial, budaya, dan ekonomi. Media penyiaran terutama televisi swasta yang selama ini banyak menuai kritik karena terlalu banyak menayangkan program-program yang sangat miskin muatan sosial dan pendidikannya seolah menjadi semacam malakat yang sarat empati dan menyegarkan masyarakat korban bencana.

Media Penyiaran: Salah Satu Bentuk Media Massa

Keberadaan media sangat penting dalam perubahan kehidupan manusia saat ini, mulai dari kepentingan pribadi hingga kelompok, dari urusan keluarga sampai urusan bernegara, dari urusan budaya sampai urusan bisnis. Dalam kehidupan di sekitar kita, fenomena fungsional media menjadi hal yang sudah terstruktur dalam kehidupan sehari-hari. Di rumah, kantor, dan sekolah, semuanya menggunakan teknologi media sebagai medium yang sangat fungsional dalam tugas sehari-hari. Perkembangan teknologi media ini mendorong perubahan yang sangat luar biasa pada kehidupan media massa sendiri (berhubungan dengan teknologi media), maupun pada praktek bernegara di semua negara.

Media penyiaran sebagai salah satu bentuk media massa memiliki ciri dan sifat yang berbeda dengan media massa lainnya, bahkan diantara sesama media penyiaran, misalnya radio dan televisi, terdapat berbagai perbedaan sifat. Media massa televisi meskipun sama dengan radio dan film sebagai media massa elektronik, tetapi mempunyai ciri dan sifat yang berbeda, terlebih lagi dengan media massa cetak seperti surat kabar dan majalah.

Televisi dan radio dapat dikelompokkan sebagai media yang menguasai ruang tetapi tidak menguasai waktu, sedangkan media cetak menguasai waktu tetapi tidak menguasai ruang. Artinya, siaran dari suatu media televisi atau radio dapat diterima dimana saja dalam jangkauan pancarannya (menguasai ruang) tetapi siarannya tidak dapat dilihat kembali (tidak menguasai waktu). Media cetak untuk sampai ke pembaca memerlukan waktu (tidak menguasai ruang), tetapi dapat dibaca kapan saja dan dapat

Media penyiaran sebagai salah satu bentuk media massa memiliki ciri dan sifat yang berbeda dengan media massa lainnya, bahkan diantara sesama media penyiaran, misalnya radio dan televisi, terdapat berbagai perbedaan sifat.

Pola peliputan media tentang bencana biasanya mengikuti kurva normal, pada awalnya mungkin sedikit, tetapi dalam waktu singkat isi media didominasi oleh pemberitaan tentang bencana.

diulang-ulang (menguasai waktu). Radio dan televisi merupakan bentuk media massa yang efisien dalam mencapai audiennya dalam jumlah yang sangat banyak (Morissan, 2005).

Berita Bencana Sebagai Tontonan

Berita ibarat seperti es krim yang gampang meleleh, bersamaan dengan berjalannya waktu nilai berita semakin berkurang. Pola peliputan media tentang bencana biasanya mengikuti kurva normal, pada awalnya mungkin sedikit, tetapi dalam waktu singkat isi media didominasi oleh pemberitaan tentang bencana. Gusti Ngurah Putra dalam Seminar Publik (2006) mengatakan bahwa tidak kurang dari 25% laporan media berisi tentang bencana.

Laporan tentang bencana perlahan-lahan sudah tidak lagi menarik, sehingga intensitas pelaporan juga menurun drastis. Jika dalam masa dua minggu setelah bencana, awak media *berseliweran* datang ke daerah bencana, setelah itu biasanya media cenderung melupakan daerah bencana. Para korban bencana kembali "sendirian" dengan perasaan yang mungkin sangat berbeda dengan sebelum bencana.

Perspektif bagi industri televisi menempatkan penonton sebagai komoditas yang dijual pada pengiklan, yang terpenting adalah jumlah dan segmen penonton yang menarik pengiklan. Ketika bencana terjadi, peristiwa ini tampil sebagai tontonan yang sangat ditunggu untuk disaksikan hampir semua televisi menayangkan berita tersebut. Dalam suasana kompetitif ini sulit diharapkan media TV akan bersedia bekerjasama dalam sebuah gerak kolektif membangun masyarakat, mereka cenderung menyajikan program yang terpecah-pecah, tidak mendalam, dan tidak terfokus.

Metro TV sebagai televisi yang siarannya berbasis berita, selama beberapa hari menayangkan berita mengenai bencana gempa di Yogyakarta secara terus menerus dan eksklusif, juga ketika pemberitaan tentang status gunung Merapi. Keingintahuan masyarakat akan berita tersebut sangat tinggi, dan informasi yang disajikan menjadi selalu perhatian, sehingga memiliki nilai berita yang sangat tinggi. Walter Lippman, seorang wartawan Amerika yang terkenal menyebutkan bahwa suatu berita memiliki nilai layak berita jika di dalamnya ada unsur kejelasan (*clarity*) tentang kejadiannya, kejutannya (*surprise*), kedekatannya (*proximity*) secara geografis, serta dampak (*impact*) dan konflik personalnya. Pengelompokan nilai berita pertama kali diberikan oleh Wilbur Schramm dalam tulisannya yang berjudul *The Nature of news*. Ia membedakan jenis-jenis berita dalam dua kelompok, yaitu yang memberikan kepuasan tertunda dan yang memberikan kepuasan segera kepada pendengar atau penonton. (Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, 2005). Berita-berita seperti korupsi, kecelakaan, dan bencana termasuk pada kelompok berita yang

kedua, sedangkan yang termasuk dalam kelompok berita yang pertama adalah informasi tentang masalah ekonomi, keadaan cuaca dan sebagainya.

Media dan Bencana

Media massa memiliki kemampuan untuk memusatkan perhatian publik pada isu-isu tertentu, namun juga memiliki kemampuan untuk mengalihkan perhatian publik pada beragam isu yang berbeda (Ade Armando, 2006). Ada dua hal yang menyebabkan media memiliki peran dan perhatian yang besar terhadap segala bentuk bencana. *Pertama*, bencana biasanya menciptakan situasi yang tidak pasti (*uncertainty*). Manusia harus berkomunikasi dengan manusia lainnya agar ia dapat mempertahankan hidupnya. Ia harus mendapat informasi dari orang lain dan memberikan informasi kepada orang lain. Ia perlu tahu apa yang terjadi di sekitarnya, di kotanya, di negaranya, dan semakin lama semakin ingin tahu apa yang terjadi di dunia. Tugas dan fungsi pers adalah mewujudkan keinginan ini melalui media baik cetak maupun elektronik. Dalam situasi bencana, warga masyarakat akan memuncak rasa ingin tahunya, mereka akan bertanya apa yang akan terjadi, oleh karena itu mereka berusaha mencari tahu jawabannya. Komunikasi terjadi karena orang ingin mengurangi ketidakpastian. Perhatian orang terhadap media massa pada masa-masa krisis cenderung mengalami peningkatan. Oplah surat kabar meningkat, begitu juga dengan siaran televisi.

Kedua, bencana bagi media merupakan *event* besar yang tidak bisa dilewatkan begitu saja, dan bencana memiliki daya tarik yang luar biasa. Sebuah berita dalam media massa sering disebut sebagai "cerita". Wartawan terlatih untuk mencari kejadian yang memiliki kemiripan dengan sebuah fiksi yang baik : ada unsur dramatik, masalah, solusi, dan tindakan-tindakan yang muncul. Sebuah bencana seperti gempa yang kita alami belakangan ini, bagi media TV jelas mengandung semua unsur itu. Lebih baik meliput bencana yang panggungnya sendiri sudah mengandung unsur dramatik bukan buatan, daripada membuat sinetron tak bermutu yang mungkin tak laku.

Seringkali media massa memainkan perannya secara sepihak. Keberpihakan ini terdiri dari beberapa bentuk, yaitu *Pertama*, keberpihakan media massa pada kapitalisme. Saat ini hampir tidak ada lagi media massa yang tidak dimiliki oleh kapitalis, dalam arti media massa digunakan oleh kekuatan-kekuatan kapital untuk menjadikan media massa sebagai mesin penciptaan uang dan pelipatgandaan modal. Ia tidak ada bedanya dengan supermarket, pabrik kertas, pabrik uranium, dan sebagainya. Semua elemen media massa, termasuk pekerja media, berpikir untuk melayani kapitalisnya, ideologi mereka adalah "membuat media massa laku" di masyarakat. *Kedua*, keberpihakan semu

Perhatian orang terhadap media massa pada masa-masa krisis cenderung mengalami peningkatan. Oplah surat kabar meningkat, begitu juga dengan siaran televisi.

Media massa penyiaran mendatang adalah media yang benar-benar menjadi "benda" yang sangat fleksibel dan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi media.

pada masyarakat, dalam bentuk empati, simpati, dan berbagai partisipasi kepada masyarakat, namun ujung-ujungnya adalah juga untuk "menjual berita" dan menaikkan *rating* untuk kepentingan kapitalis. Kasus yang dapat dilihat dari keberpihakan seperti ini adalah pemberitaan tsunami yang melanda Aceh, Nias, dan sekitarnya dalam kemasan berita *Indonesia Menangis* dan semacamnya yang terus-menerus diekspos, bahkan sampai pada sisi yang telah meninggalkan hak-hak sumber berita. Begitu pula fenomena *reality show* seperti *Bedah Rumah*, *Uang Kaget*, *Tolong*, *Rezeki Nomplok*, *Kawin Gratis*, dan sebagainya yang mengeksploitasi airmata, dan mengumbar empati, simpati, maupun kontroversi.

Media massa penyiaran mendatang adalah media yang benar-benar menjadi "benda" yang sangat fleksibel dan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi media. Ketergantungan media massa penyiaran terhadap teknologi media ini menyebabkan media penyiaran terus beradaptasi dengan kemajuan dan perkembangan teknologi media serta sekaligus menjadikan institusi ini amat sangat tergantung pada kapitalis yang menghidupkannya.

Dua sisi itu akan memainkan peran idealisme dan peran pasar yang selalu menuntut media penyiaran, terutama sumber daya manusianya, untuk benar-benar menjadi figur-figur yang sulit di masa yang akan datang. Peran idealisme menuntut SDM berfikir profesional dimana masyarakat menjadi basis sosial mereka yang harus dijaga dan diselamatkan, namun peran institusi produksi kapitalis menuntut media penyiaran menjadi lumbung uang dan penghasil modal. Apabila dinilai tidak produktif maka media massa penyiaran akan "dibunuh" oleh pemiliknya. Inilah realitas masa depan media massa penyiaran sesungguhnya. (Burhan Bungin, 2001)

Fungsi Kontrol Pers

Dalam kehidupan sosial politik, media fungsi pengawasan terhadap berbagai bentuk kekuasaan yang ada. Fungsi kontrol media yang bertanggung jawab adalah dengan masuk ke balik panggung kejadian untuk menyelidiki pekerjaan pemerintah atau perusahaan, ia harus memberitakan apa yang berjalan baik dan tidak berjalan baik. Dalam konteks ini, media mempunyai fungsi "watchdog" yang berfungsi untuk mengawasi mereka yang memiliki kekuasaan baik dalam bidang politik (pemerintah), organisasi nirlaba, maupun sektor swasta. Ini dilakukan agar para pemegang kekuasaan tersebut bertanggung jawab terhadap segala tindakannya. Fungsi ini harus dilakukan dengan lebih aktif oleh media daripada oleh kelompok masyarakat lainnya. Media massa ditempatkan sebagai salah satu kekuatan penting yang ada di tengah masyarakat, yang dalam konsep lama disebut sebagai kekuatan keempat setelah legislatif, eksekutif, dan

yudikatif. Dalam peranan yang demikian ini, media massa harus mampu melahirkan laporan-laporan *investigative* untuk menampilkan berbagai penyelewengan kekuasaan yang berlangsung dalam berbagai lembaga yang ada.

Dalam proses *recovery* pasca bencana, fungsi kontrol ini sangat penting untuk dilakukan oleh media massa, karena berbagai kekuatan ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang ada cenderung memperoleh kewenangan yang berlebihan dan dalam beberapa hal lebih bebas dalam melakukan proses pemulihan masyarakat yang menjadi korban bencana. Ini sebagai konsekuensi dari status kedaruratan yang ada. Pemerintah relatif mudah mengalihkan berbagai sumber daya yang ada bagi kepentingan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Berbagai kekuatan dan lembaga sosial dengan mudah berhasil membangun solidaritas sosial baik dalam bentuk pengumpulan dana besar-besaran dalam masa tanggap darurat maupun setelah masa itu. Di atas mereka itu, semua bertameng demi kepentingan kemanusiaan, korban bencana "dijual" untuk memperoleh bantuan.

Di tengah-tengah kekuasaan berlebihan seperti itu, sangat mudah terjadi penyelewengan, penyalahgunaan, atau korupsi terhadap berbagai sumber daya yang ada. Ini tidak saja potensial dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh berbagai lembaga sosial yang mengklaim diri sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat. Oleh karena itu lembaga-lembaga yang memperoleh kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan proses pemulihan pasca bencana, disamping telah memiliki berbagai mekanisme pengawasan, tentu perlu diawasi oleh media massa. Media harus benar-benar mewujudkan fungsi *watchdog*-nya, sehingga segala bentuk kemungkinan penyelewengan kewenangan yang ada, seperti yang terjadi di Aceh, dapat diungkap dan akhirnya menjadi perhatian bersama.

Media massa sendiri juga potensial menjadi lembaga yang memiliki kewenangan yang cukup besar dalam melakukan mobilisasi sumber daya. Berbagai media massa yang berlomba untuk membuka dompet bantuan yang menyediakan sarana bagi masyarakat yang ingin membantu para korban bencana. Misalnya Metro TV, dalam waktu sekitar sebulan berhasil mengumpulkan dana tidak kurang dari dua miliar. Oleh karena itu media sendiri juga perlu mendapat pengawasan secara terus menerus agar mereka juga tidak menyalahgunakan potensi yang dimilikinya.

Potensi ketidakadilan dan ketidakmerataan bantuan dalam proses *recovery* pasca juga sangat besar. Pada masa awal, banyak korban yang tidak memperoleh bantuan yang paling esensial untuk mempertahankan kehidupannya, sementara di tempat lain ada yang memperoleh bantuan berlimpah ruah. Disini fungsi media sebagai media kontrol juga harus berperan memberikan informasi mengenai daerah-daerah yang belum tersentuh bantuan, agar

Media massa sendiri juga potensial menjadi lembaga yang memiliki kewenangan yang cukup besar dalam melakukan mobilisasi sumber daya.

bantuan dapat diterima oleh seluruh korban gempa tanpa terkecuali dan merata.

Lembaga Penyiaran Lokal Sebagai Media Alternatif

Bencana selalu menyisakan beragam persoalan yang harus dihadapi oleh masyarakat korban bencana. Segudang persoalan fisik, ekonomi, psikologis, dan sosial yang tidak mungkin diselesaikan sendiri, harus ditanggung oleh korban bencana. Penyelesaian persoalan tersebut tentunya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Menyerahkan sepenuhnya penanganan persoalan tersebut kepada institusi pemerintah tampaknya tidak akan sepenuhnya menyelesaikan masalah. Pengalaman menunjukkan bahwa kemampuan birokrasi dalam penyampaian informasi dan pemanfaatan media formal untuk mendorong masyarakat menjalani proses pemulihan sering tidak dapat berlangsung dengan baik karena terhambat oleh struktur birokrasi yang berbelit-belit.

Atas kondisi birokrasi tersebut kontrol publik pun sangat diperlukan agar mesin birokrasi dapat bekerja dengan baik, dan media massa mestinya dapat berperan lebih besar dalam proses pemulihan melalui program-program yang mampu memberikan pencerahan dan pemberdayaan serta semangat bagi masyarakat korban bencana serta menjalankan fungsi kontrolnya. Akan tetapi seberapa besar konsistensi dan daya tahan media penyiaran melakukan fungsi sosialnya setelah masa tanggap darurat berlalu? Apalagi media mempunyai keterikatan untuk selalu menyajikan sesuatu yang baru dan hangat (layak berita).

Masyarakat pun menghendaki atau lebih tepat membutuhkan berita yang dapat mereka ketahui dengan cepat, untuk melegakan perasaan mereka ketika terjadi bencana, untuk dapat bertindak sebagai warga masyarakat yang melek informasi pada saat-saat dibutuhkan keputusan. Permintaan akan berita hangat yang sedemikian besarnya membuat sebuah kejadian yang memenuhi surat kabar pada suatu hari tertentu akan menjadi basi untuk dimuat keesokan harinya. Dalam hal ini, kecepatan memperoleh berita hangat di lokasi bencana dimiliki oleh stasiun TV lokal.

Ade Armando dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat mengatakan bahwa stasiun televisi nasional sebenarnya media yang sangat berkekuatan untuk menjangkau dan mempengaruhi masyarakat luas, namun terdapat sejumlah eksternalitas yang menjadikannya justru tidak mengambil peran sebagai media pemobilisasi solidaritas sosial. Eksternalitas ini terkait dengan fakta bahwa mereka adalah lembaga bisnis yang beroperasi dengan jangkauan khalayak nasional, sehingga tidak memungkinkannya untuk terus menayangkan berita bencana lokal secara berulang-ulang dan tidak menarik lagi, sementara mereka dituntut untuk dapat meraup keuntungan finansial melalui iklan TV komersial.

Umumnya stasiun nasional tidak bisa memberi perhatian

Ade Armando dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat mengatakan bahwa stasiun televisi nasional sebenarnya media yang sangat berkekuatan untuk menjangkau dan mempengaruhi masyarakat luas, namun terdapat sejumlah eksternalitas yang menjadikannya justru tidak mengambil peran sebagai media pemobilisasi solidaritas sosial.

cukup lama pada daerah tertentu, bahkan masyarakat yang tinggal di daerah bencana harus menyaksikan isi televisi yang tidak relevan, atau bahkan bertentangan dengan penderitaan mereka. Oleh karena itu televisi nasional tidak bisa diharapkan membangun suasana psikologis yang dibutuhkan untuk pemulihan pasca bencana (Ade Armando, 2006).

Dari keterbatasan yang dimiliki stasiun TV nasional di atas, mestinya lembaga-lembaga penyiaran lokal yang berinisiatif mengambil peran tersebut, seperti yang dikatakan oleh Zainal A. Suryokusumo, dalam pengantar diskusi *Media, Solidaritas Sosial, dan Proses Rekonstruksi Pasca Gempa* di FISPOL UGM beberapa waktu yang lalu: sebenarnya yang paling bisa diandalkan sumbangannya dalam proses rekonstruksi pasca bencana adalah media lokal, sejak dari bencana tsunami di Nanggro Aceh Darussalam dan sekitarnya hingga bencana gempa Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, tak lebih dan tak kurang *Business as Usual*.

Kekuatan lembaga penyiaran komunitas yang mempunyai karakteristik independen, non-partisan, non-komersial, dan berfungsi melayani kepentingan komunitasnya terletak pada tingkat partisipasi yang tinggi dan keterikatan dari masyarakat di sekitar lokasi lembaga penyiaran tersebut. Lembaga penyiaran komunitas pun relatif lebih lentur dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat/ komunitasnya dalam program-programnya. Lembaga penyiaran komunitas seharusnya mampu menjawab tantangan ketersediaan informasi yang memadai bagi kepentingan masyarakat di lokasi bencana. Terobosan yang bisa dilakukan dalam upaya memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas, khususnya radio komunitas, adalah dengan mendirikan stasiun siaran darurat yang lebih bertumpu pada informasi berkenaan dengan pemulihan di Yogyakarta dan sekitarnya, seperti rekonstruksi perumahan yang porak poranda, pemulihan sentra-sentra produksi, kesehatan, *trauma healing*, kegiatan pendidikan di daerah-daerah pengungsian dan sebagainya.

Jika dicermati, gaya pelaporan media tentang bencana cenderung masih didominasi gaya jurnalisme konvensional. Jurnalis ibarat ilmuwan yang sedang menyelidiki sesuatu dengan berusaha sekuat kemampuan untuk objektif, melaporkan apa yang mereka lihat apa adanya, tanpa memberi solusi untuk ikut memecahkan masalah yang muncul akibat bencana yang terjadi. Pemberitaan dengan gaya seperti itu mungkin muncul juga solusi, tetapi bisa jadi itu hanya akibat sampingan saja. Dalam konteks bencana, barangkali penjajagan untuk menerapkan *civil journalism* atau *public journalism* oleh kalangan media perlu dilakukan. Media penyiaran memberi kesempatan kepada warga untuk menjadi "reporter" untuk melaporkan berbagai kejadian menarik dan bermakna bagi lingkungannya. Hal itu akan menjadi lebih bermakna bila ini tidak saja dilakukan pada waktu sesaat

Kekuatan lembaga penyiaran komunitas yang mempunyai karakteristik independen, non-partisan, non-komersial, dan berfungsi melayani kepentingan komunitasnya terletak pada tingkat partisipasi yang tinggi dan keterikatan dari masyarakat di sekitar lokasi lembaga penyiaran tersebut.

Televisi lokal saat ini sudah mulai menarik minat masyarakat karena menonjolkan unsur-unsur lokal yang direpresentasikan dengan penayangan berita daerah, program acara dialog menyangkut kebijakan publik, serta permasalahan yang sangat akrab dengan penontonnya, juga mempunyai potensi yang sangat besar dalam masa pemulihan pasca bencana ini.

setelah bencana terjadi, melainkan sampai hari ini model peliputan seperti itu juga bisa dilakukan, tentunya isu yang diangkat dikaitkan dengan fungsi media sebagai *watchdog*, media ikut mengawasi proses rekonstruksi yang sedang berlangsung.

Televisi lokal saat ini sudah mulai menarik minat masyarakat karena menonjolkan unsur-unsur lokal yang direpresentasikan dengan penayangan berita daerah, program acara dialog menyangkut kebijakan publik, serta permasalahan yang sangat akrab dengan penontonnya, juga mempunyai potensi yang sangat besar dalam masa pemulihan pasca bencana ini. Seperti yang ditulis oleh Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat dalam buku berjudul *Jurnalistik, Teori dan Praktek*, salah satu unsur nilai berita adalah kedekatan (*proximity*). Peristiwa yang mengandung unsur kedekatan dengan penonton, akan menarik perhatian. Sieler dan Lippmann menyebutnya sebagai kedekatan secara geografis. Unsur kedekatan ini tidak harus dalam pengertian fisik seperti yang disebutkan oleh Sieler dan Lippmann itu, tetapi juga kedekatan emosional. Unsur kedekatan ini mendasarkan konsepnya pada *mirror theory*, yaitu orang senantiasa sangat menyukai hal-hal tentang dirinya sendiri, sebab itu manusia senang bercermin dan berfoto. Selain menyukai hal-hal tentang dirinya, manusia juga menyukai orang-orang yang dekat dengan dirinya seperti teman, keluarga, dan tetangganya, atau tentang hal-hal yang tampak atau terjadi di sekitarnya.

Kesimpulan

Dalam proses pemulihan pasca bencana media penyiaran lokal lah yang paling berperan karena umumnya media penyiaran seperti televisi swasta yang memiliki jangkauan nasional tidak bisa memberi perhatian cukup lama pada persoalan-persoalan masyarakat, khususnya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta pasca bencana. Lebih dari itu yang terpenting adalah membangun komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antar lembaga penyiaran dalam penyusunan program khusus yang mengandung muatan pencerahan, pemberdayaan, dan semangat bangkit kembali bagi masyarakat korban gempa. Pertukaran program, *relay*, dan penyiaran secara serentak yang dipandang mempunyai daya tarik besar juga dapat dilakukan.

Referensi

- Bungin Burhan. 2001. *Imaji Media Massa: Konstruksi dan Makna Realitas Sosial Iklan Televisi dalam Masyarakat Kapitalistik*. Yogyakarta: Jendela.
- Hikmat K., dan Purnama Kusumaningrat. 2005. *Jurnalistik, Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Morissan. 2005. *Media Penyiaran Strategi Mengelola Radio dan Televisi*. Tangerang: Ramdina Prakarsa.
- _____. 2006. *Media, Solidaritas Sosial, dan Proses Rekonstruksi Pasca Bencana*, Makalah seminar nasional tidak diterbitkan. Yogyakarta: FISPOL UGM.
- Jalaluddin Rakhmat. 1992. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.